

2026



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON

JALAN MONUMEN NO.1
KOTA CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Ridha dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 ini sebagai wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama periode tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan rangkaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami mengacu kepada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 ini telah dilakukan semaksimal mungkin, namun demikian kami menyadari bahwa dalam penyusunan tersebut masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, untuk itu sangat diharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon khususnya dan bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah pada umumnya.

Cirebon, 5 Februari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON



Drs. AGUS HERDHYANA, M.Si
NIP. 19680823 198803 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Tahun 2025 merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan dan bidang Penelitian Pengembangan tahun 2025 sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kota Cirebon berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon tahun 2025 - 2029, dimana pada RPJMD ini terdapat visi dan misi dimana Visi Kota Cirebon 2025 – 2029, yaitu: **“TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029”**. Untuk Misi dari RPJMD tersebut, Bappelitbangda berfokus pada Misi III, yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”**. Selanjutnya ditetapkan beberapa sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kota Cirebon tahun 2025 - 2029, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah;
3. Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau Stakeholder

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja BAPPELITBANGDA Kota Cirebon, diperoleh tingkat capaian kinerja sasaran I “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon” sebesar 102,15% dengan didukung oleh 2 program dan 7 kegiatan, sasaran II “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah” sebesar 103,26% dengan dukungan oleh 4 program dan 19 kegiatan, sedangkan capaian kinerja sasaran III “Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau Stakeholder” sebesar

100,00% didukung dengan 1 program dan 4 kegiatan. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan BAPPELITBANGDA tersebut merupakan rincian capaian kinerja sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kota Cirebon tahun 2025 - 2029.

Pencapaian sasaran kinerja BAPPELITBANGDA Kota Cirebon Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA Kota Cirebon Nomor: 000.7/Kep.12-BAPPELITBANGDA tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 - 2029. Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2025, BAPPELITBANGDA melaksanakan 4 program dengan 19 kegiatan dan 62 sub kegiatan..

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon memperoleh anggaran sebesar Rp 3.984.634.659,00 digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Cirebon serta untuk mencapai target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi anggaran sebesar Rp 3.438.505.325,00 atau sekitar 86,29% dari total anggaran yang diterima.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2

1.2. Aspek Strategis BAPPELITBANGDA 6

1.3. Isu Strategis BAPPELITBANGDA 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

2.1. Rencana Strategis 13

2.2. Indikator Kinerja Utama 16

2.3. Rencana Kinerja Tahunan..... 16

2.4. Perjanjian Kinerja 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 19

3.1. Rencana Aksi Tindak Lanjut Peningkatan Akuntabilitas Kinerja..... 21

3.2. Capaian Kinerja BAPPELITBANGDA..... 26

3.3. Capaian Kinerja atas IKU BAPPELITBANGDA 28

3.4. Evaluasi dan Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tiap Tahun..... 28

3.5. Realisasi Anggaran BAPPELITBANGDA 37

3.6. Akuntabilitas Keuangan..... 41

3.7. Prestasi dan Penghargaan 45

3.8. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penghambat serta Evaluasi 46

BAB IV PENUTUP 49

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dibuat oleh penyelenggara negara termasuk instansi Pemerintah Daerah (PD). SAKIP sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, turukur dan efektif yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh SKPD termasuk BAPPELITBANGDA diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun. Pada tahun 2025 ini mulai diberlakukan Resntra Namun untuk tahun ini Bappelitbangda sudah menggunakan Renstra untuk periode tahun 2025 – 2029. Untuk periode tahunan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selanjutnya DPA tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun Perjanjian Kinerja SKPD. Tahun 2025 ini, melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 000.7/Kep.12-BAPPELITBANGDA tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 - 2029.

Laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai SKPD berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang wajib disusun setiap akhir tahun termasuk oleh BAPPELITBANGDA.

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.
- Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon mempunyai tugas pokok: *"Membantu Wali Kota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah"*.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kota Cirebon mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian pengembangan;

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

2. pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. pelaksanaan administrasi Badan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, sesuai dengan SOTK yang tercantum dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, adalah sebagai berikut:

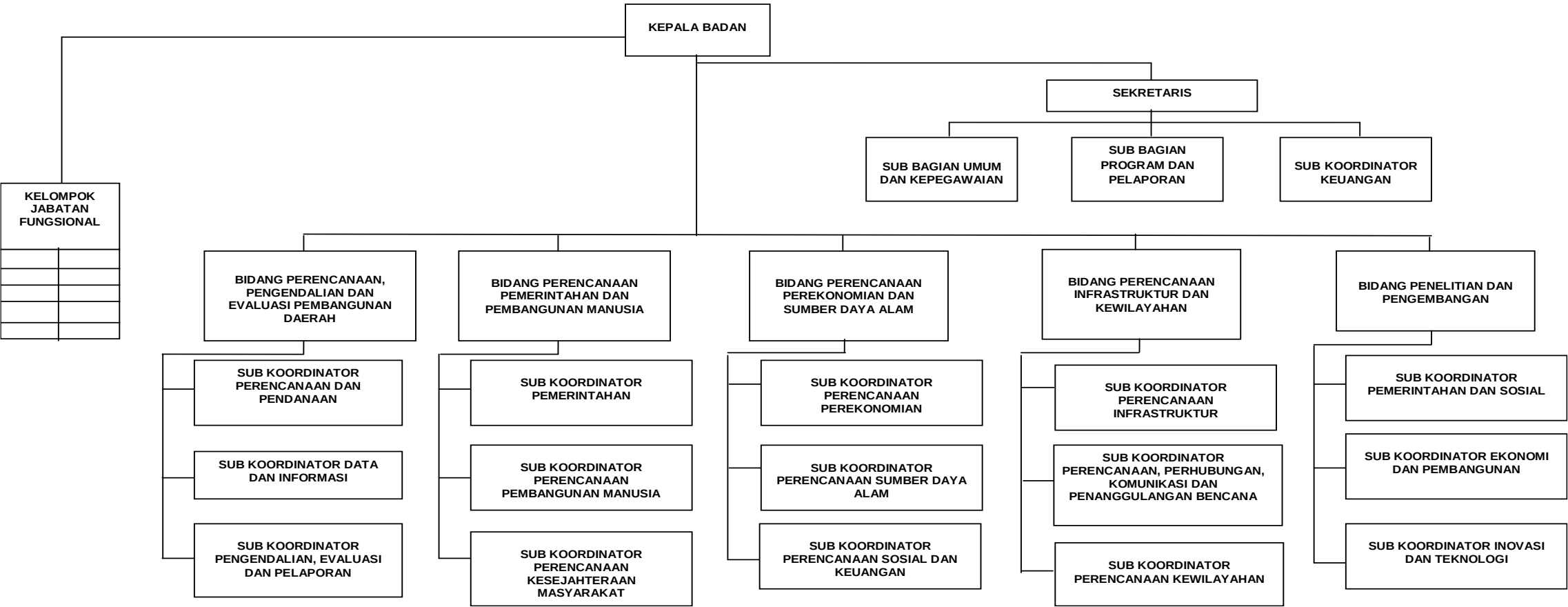
Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA Kota Cirebon terdiri atas :

Kepala Badan, membawahkan:

1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Koordinator Keuangan.
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Sub Koordinator Data dan Informasi
 - c. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:

- a. Sub Koordinator Perencanaan Pemerintahan;
 - b. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat.
4. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
- a. Sub Koordinator Perencanaan Perekonomian;
 - b. Sub Koordinator Perencanaan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan Sosial dan Keuangan.
5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan :
- a. Sub Koordinator Perencanaan Infrastruktur;
 - b. Sub Koordinator Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Penanggulangan Bencana; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan Kewilayahan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
- a. Sub Koordinator Pemerintahan dan Sosial;
 - b. Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON
(PERWAL 102 TAHUN 2021)



1.2. Aspek Strategis BAPPELITBANGDA

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) sebagai Lembaga Teknis Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan daerah. Kondisi penyelenggaraan pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Cirebon dalam urusan perencanaan dapat ditinjau dari beberapa aspek:

1. Kelembagaan

Kelembagaan BAPPELITBANGDA Kota Cirebon sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Cirebon Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon bahwa dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu oleh Sekretaris dan enam Kepala Bidang yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah.

2. Mekanisme Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh

rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih calon Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka dengan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANGDA) Kota Cirebon telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah: Penyusunan RPJPD Tahun 2025 - 2045 Kota Cirebon yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024.

- b. Dokumen Perencanaan Jangkah Menengah: Penyusunan RPJMD Tahun 2025 - 2029 Kota Cirebon yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2025 - 2029.
- c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Tahun 2025.
- d. Dokumen Perencanaan Teknis Lainnya: penyusunan RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031 yang telah ditetapkan dalam Perda nomor 8 Tahun 2012.
- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan, forum Perangkat Daerah, penyusunan RKPD, dan dukungan data dalam penyusunan KUA-PPAS, RAPBD dan APBD.

4. Sumber Daya Manusia

BAPPELITBANGDA Kota Cirebon dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Walikota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, didukung oleh SDM yang cukup berkompeten, beberapa diantaranya telah mengikuti diklat fungsional perencana dan diklat teknis terkait perencanaan. Jumlah SDM yang dimiliki oleh BAPPELITBANGDA Kota Cirebon pada tahun 2025 sebanyak 57 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 11 orang, Golongan III sebanyak 34 orang, Golongan II sebanyak 1 orang, serta pegawai berstatus PPPK baik yang paruh waktu maupun penuh waktu sebanyak 11. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, SDM BAPPELITBANGDA Kota Cirebon terdiri dari Pasca Sarjana (S2) sebanyak 14 orang, Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV)/Sederajat sebanyak 39 orang, Diploma III (D III) sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 2 orang.

5. Dukungan Anggaran

BAPPELITBANGDA Kota Cirebon, di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan dukungan anggaran dari APBD kota Cirebon sebesar Rp 13.297.050.790,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp 9.312.416.131,-, Belanja Barang dan Jasa Rp 3.690.531.559,-, dan Belanja Modal Rp 294.103.100,-. Anggaran tersebut cukup memadai untuk mendukung pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA yang telah ditargetkan.

6. Dukungan Teknologi Informasi

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, mempunyai pengaruh positif bagi kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari. Saat ini Pemerintah Kota Cirebon sudah memiliki Internet Service Provider (ISP) sendiri dan seluruh Perangkat Daerah sudah terkoneksi internet. BAPPELITBANGDA saat ini sudah menggunakan sistem informasi dalam pengelolaan perencanaan dan anggaran yaitu melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA).

1.3. Isu Strategis BAPPELITBANGDA

Aspek-aspek yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) bagi BAPPELITBANGDA Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang sangat cepat

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah pengaruh dan perannya sangat kuat dan juga perubahan-perubahannya sangat cepat, namun tidak disertai dengan pembekalan-pembekalan terhadap SDM di Daerah, sehingga ketika Daerah baru terbiasa dengan satu kebijakan sudah harus berganti dengan kebijakan lainnya.

b. Keterlambatan Perangkat Daerah dalam menyampaikan dokumen rencana

Seperti diketahui bersama, salah satu tugas BAPPELITBANGDA adalah mengolah data perencanaan yang dikumpulkan melalui Perangkat Daerah. Pengumpulan data dilakukan terhadap data primer (data yang bersumber dari lapangan baik melalui observasi maupun kuesioner) dan data sekunder (data statistik dan data Perangkat Daerah). Dalam menyelenggarakan suatu perencanaan tidak terlepas dari peran serta Perangkat Daerah, namun seringkali Perangkat Daerah terlambat dalam menyerahkan dokumen rencana sehingga proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan tingkat kota menjadi kurang optimal karena keterlambatan dalam pengumpulan data.

c. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan cenderung menurun

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berarti karena pada dasarnya pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah juga sudah melibatkan unsur masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari peran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Masyarakat terlibat dan turut memberikan kontribusi melalui usulan-usulan program kerja yang disampaikan melalui musrenbang kelurahan, dan juga melalui masukan-masukan kepada Pemerintah yang disampaikan pada forum Musrenbang. Namun saat ini peran sertanya justru cenderung menurun, mungkin mereka beranggapan bahwa program kerja Pemerintah sedikit sekali yang langsung memberikan dampak bagi mereka. Pemerintah saat ini lebih cenderung untuk membidik pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai prioritas, padahal masyarakat membutuhkan perhatian dari pemerintah berupa kegiatan yang memberikan kontribusi langsung bagi kesejahteraan mereka, misalnya bantuan bagi kelompok-kelompok usaha kecil masyarakat.

d. Penguasaan Metodologi Perencanaan Masih Kurang

Penguasaan metodologi perencanaan sebagian pegawai masih kurang, tenaga-tenaga aparatur yang ada di BAPPELITBANGDA banyak yang sudah mengalami rotasi ke Perangkat Daerah lainnya, sedangkan yang baru masuk ke BAPPELITBANGDA belum memiliki kemampuan perencanaan yang sesuai dengan harapan. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena penguasaan metodologi berguna untuk mengantisipasi regulasi kebijakan serta untuk menghasilkan perencanaan yang handal dan konsisten.

e. Belum optimalnya pemanfaatan SOP (Standard Operating Procedure)

Saat ini BAPPELITBANGDA sudah memiliki SOP yang menjadi pedoman dan tolok ukur dalam membuat suatu dokumen rencana, namun sayangnya pemanfaatan SOP untuk mendukung kinerja badan belum dijalankan secara optimal. Selain itu, belum lengkap SOP yang disusun sehingga masih ada beberapa kegiatan belum berpedoman kepada SOP.

f. Data/Informasi perencanaan masih kurang

Ketersediaan data/informasi perencanaan dirasa masih kurang mencukupi, untuk itu perlu upaya agar kebutuhan akan data/informasi perencanaan dapat ditingkatkan. Perlu juga memanfaatkan sumber data lainnya, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon seperti Cirebon Satu Data (CSD), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat seperti data Badan Pusat Statistik (BPS), dan data pembangunan bersumber dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

g. Masih adanya kegiatan dalam APBD di luar dokumen perencanaan

Hal ini terjadi karena kurangnya komitmen bersama dalam menyelenggarakan APBD yang benar. Padahal dokumen perencanaan harus menjadi komitmen bersama agar terlaksananya penyelenggaraan APBD yang sesuai.

h. Proses penyerapan Anggaran yang Rendah

Adapun tantangan pembangunan yang terjadi selama tahun 2025 adalah masih lambatnya pola penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengisian kas daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rencana pelaksanaan kegiatan. Hal ini diperparah dengan adanya efisiensi, sehingga proses penyelenggaraan pembangunan menjadi terhambat.

i. Efisiensi Anggaran

Selama kurun waktu tahun 2025, telah terjadi proses efisiensi anggaran. Hal ini disebabkan penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

a. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Cirebon harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPPELITBANGDA yang dimana Renstra Bappelitbangda mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 - 2029 Kota Cirebon.

Mengacu pada RPJMD tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, menetapkan satu tujuan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu:

“Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.”

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon merumuskan sasaran pembangunan. Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Lembaga Perangkat Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan terkait juga dapat dicapai.

- Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan maka perlu ditentukan Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon berupa Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPELITBANGDA adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra BAPPELITBANGDA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	97,95	99,10	99,32	99,54	99,76
			Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon	Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi)	97,19	97,92	98,42	99,42	99,92
			Kesesuaian RKPD terhadap RPD (Integrasi)	97,62	99,62	99,72	99,82	99,92
			Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda (Skor)	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50
		Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

b. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Cirebon telah menetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

1. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- Menyediakan bimbingan teknis untuk perencana
- Menyediakan pedoman dan tolok ukur kinerja pada BAPPELITBANGDA
- Menyediakan dukungan kebutuhan rutin kantor yang memadai
- Meningkatkan ketersediaan dan dukungan data dan informasi
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan
- Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana tindak penanganan permasalahan kota

2. Program

Program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama BAPPELITBANGDA telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 000.7/KEP.15/BAPPELITBANGDA/2025. IKU BAPPELITBANGDA diambil dari indikator tujuan dan sasaran di Renstra BAPPELITBANGDA 2025 - 2029 yang terdiri dari 5 indikator yaitu:

- 1) Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi) (target 97,19%)
- 2) Kesesuaian RKPD terhadap RPD (Integrasi) (target 97,62%)
- 3) Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi) (target 100%)
- 4) Nilai Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (target 79,50 poin)
- 5) Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder (target 100%)

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ada, Rencana Kinerja Tahunan 2025 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen yang memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka memudahkan penilaian Kinerja Perangkat Daerah (PD) maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Cirebon telah menyusun rencana kinerja tahunan yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPELITBANGDA Kota Cirebon Tahun 2024 - 2026. Adapun rencana kinerja tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025

Sasaran	Indidkator Sasaran	2025
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon	Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi)	95,46%
	Kesesuaian RKPD terhadap RPD (Integrasi)	97,62%
	Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi)	100%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda (skor)	79,50
Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	100%

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Tahun 2025 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra BAPPELITBANGDA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkan hal tersebut dituangkan melalui rencana program dan kegiatan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Adapun uraian Perjanjian Kinerja BAPPELITBANGDA Tahun 2025 Perubahan Kedua tersebut sebagai berikut:

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Perubahan Kedua Tahun 2025

Sasaran (1)	Indidkator Sasaran (2)	2025 (3)	Program (4)	Anggaran (5)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon	Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi)	97,19%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	614.309.682
	Kesesuaian RKPD terhadap RPD (Integrasi)	97,62%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	316.093.315
	Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi)	100%		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda (skor)	79,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.431.116.061
Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	100%	Program Penelitian dan Pengembangan	623.115.601

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja BAPPELITBANGDA Tahun 2025 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja BAPPELITBANGDA selama tahun 2025 sebagai pelaksanaan amanah yang diemban organisasi. Isi dari akuntabilitas kinerja tersebut merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan penjabarannya, penjelasan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja BAPPELITBANGDA.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator sasaran. Pengukuran kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKIP) dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Cirebon tahun 2025, yaitu :

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2025 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja dengan satuan rupiah.

- Indikator Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator (jumlah kegiatan); jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang atau jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya.
- Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan/atau relatif (%).

Cara pengukuran/penghitungan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Cara Pengukuran Kinerja BAPPELITBANGDA Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon	Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi)	Kesesuaian dihitung dari jumlah program yang ada di RKPD yang sesuai dengan APBD dibagi dengan jumlah program di APBD
		Kesesuaian RKPD terhadap RPD (Integrasi)	Kesesuaian dihitung dari jumlah program yang ada di RKPD yang sesuai dengan RPD dibagi dengan jumlah program di RPD
		Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi)	Kesesuaian dihitung dari prioritas pembangunan yang tercantum di kota yang sesuai dengan prioritas pembangunan baik yang ada di provinsi maupun yang di pusat
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda (Skor)	Pengukuran indikator kinerja dilakukan oleh Inspektorat dengan pengukuran yang sudah ditetapkan
3	Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	Menghitung jumlah kajian kelitbangan yang didiseminasikan dan dibandingkan dengan target kelitbangan yang didiseminasikan.

Karakteristik indikator kinerja BAPPELITBANGDA bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menggambarkan pencapaian yang semakin baik dengan rumusan :

$$\% \text{ tingkat capaian kinerja} = \frac{REALISASI}{RENCANA} \times 100\%$$

Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja $\geq 90\%$ sampai dengan 100% = Sangat Baik
- b. Capain kinerja $\geq 75\%$ sampai dengan $89,99\%$ = Baik
- c. Capain kinerja $\geq 65\%$ sampai dengan $74,99\%$ = Cukup
- d. Capaian kinerja $\geq 50\%$ sampai dengan $64,99\%$ = Kurang
- e. Capaian Kinerja $\leq 49,99\%$ sampai dengan 0% = Sangat Kurang

3.1. Rencana Aksi Tindak Lanjut Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian Akuntabilitas Kinerja dengan diantaranya membuat rencana aksi tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024. Rencana Aksi Peningkatan Implementasi SAKIP tahun 2025 disusun berdasarkan rekomendasi LHE yang selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan, serta membuat upaya melalui aktivitas yang dinilai dapat mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah laporan penyelenggaraan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan rencana aksi yang disusun

No	Komponen	Permasalahan	Rencana Aksi	Kegiatan	Target				Progres
					T1	T2	T3	T4	
1.	Perencanaan Kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengukuran Kinerja	Upaya pemanfaatan pengukuran kinerja agar menjadi dasar dalam penempatan/pemberian reward dan punishment	Berkoordinasi dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda dalam proses jabatan dan penyesuaian organisasi	Koordinasi (terkait pemanfaatan e-kinerja terhadap sistem merit dalam manajemen ASN)	25 %	50 %	75 %	100 %	Pemanfaatan sistem e-kinerja sebagai bagian sistem merit
		Penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda dalam proses capaian kinerja	Koordinasi dalam pemanfaatan aplikasi kinerja melalui e-SAKIP	25 %	50 %	75 %	100 %	Pemanfaatan sistem e-Sakip pada https://esakip.cirebonkota.go.id/admin/pe ngukuran
3	Pelaporan Kinerja	Dokumen laporan kinerja menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, dan upaya perbaikan/penyempurnaan	Melengkapi laporan kinerja dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja secara sistem	Pemanfaatan E-SAKIP dalam proses pelaporan kinerja	25 %	50 %	75 %	100 %	Pemanfaatan sistem e-Sakip pada https://esakip.cirebonkota.go.id/admin/pel aporan

No	Komponen	Permasalahan	Rencana Aksi	Kegiatan	Target				Progres
					T1	T2	T3	T4	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Kualitas untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Kelengkapan laporan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Dokumen laporan dan pemenuhan data pada e-sakip	25 %	50 %	75 %	100 %	Pemanfaatan sistem e-Sakip pada https://esakip.cirebonkota.go.id/admin/evaluasi

Upaya yang dilakukan pada tabel diatas diharapkan menjadi katalis dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkup Bappelitbangda Kota Cirebon. Hasil evaluasi pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon serta Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700.1.2.1/LHE.098-PEP/2025 tanggal 30 Juni 2025, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon memperoleh nilai SAKIP sebesar 80,95 dengan predikat (A), dimana nilai tersebut mengalami peningkatan skor sebesar 1,65 yang dimana nilai SAKIP pada tahun sebelumnya sebesar 79,30 dengan predikat (BB). Berikut adalah penilaian SAKIP tahun 2025

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	80,95
Predikat			A

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025, masih terdapat beberapa permasalahan yang ada di Bappelitbangda Kota Cirebon yang mengakibatkan terhambatnya implementasi akuntabilitas kinerja. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, Bappelitbangda Kota Cirebon menyusun rencana aksi dan tindak lanjut atas hasil LHE 2025 di tahun 2026 dalam tabel berikut :

Komponen	Permasalahan	Rencana Aksi	Kegiatan	Target (%)			
				T1	T2	T3	T4
Perencanaan Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran belum dijabarkan pada Dokumen Rencana Kinerja	Menambahkan informasi terkait Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2026	Desk terkait Indikator Kinerja Sasaran pada Renja 2026	50%	100%		
Pengukuran Kinerja							
Pelaporan Kinerja	LKIP bab IV belum sesuai standar	Melakukan perbaikan sistematika LKIP berdasarkan perwal	Melakukan perbaikan sistematika LKIP khususnya pada bab IV berdasarkan perwal	100%			
	LKIP belum menginformasikan perbandingan realisasi capaian kinerja untuk tiap indikator kinerja dengan realisasi di level nasional/internasional atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau	Menyusun dokumen LKIP yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja	Membuat dokumen LKIP yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja baik di tingkat nasional/internasional atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara	100%			

Komponen	Permasalahan	Rencana Aksi	Kegiatan	Target (%)			
				T1	T2	T3	T4
	sekelas (<i>benchmark</i> kinerja)		atau sekelas (<i>benchmark</i> kinerja)				
	Penyusunan LKIP belum melibatkan pegawai terkait	Melibatkan seluruh pegawai yang sudah ditetapkan sebagai Tim untuk melakukan Pembahasan Penyusunan LKIP	Membuat Tim Penyusunan LKIP dan melakukan rapat serta mendokumentasikann ya ke dalam notulen maupun foto rapat	100%			
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal							

3.2. Capaian Kinerja BAPPELITBANGDA

Selanjutnya, untuk Pencapaian sasaran strategis BAPPELITBANGDA pada tahun 2025, sesuai dengan dokumen Renstra BAPPELITBANGDA tahun 2024 – 2026 yang didasari oleh dokumen RPD Kota Cirebon Tahun 2024 - 2026 serta dokumen Renstra Bappelitbangda Tahun 2025 – 2029 yang didasari oleh dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025 – 2029 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak tiga sasaran telah ditetapkan pada tahun 2025 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja BAPPELITBANGDA Tahun 2025 yang memiliki 5 indikator sasaran yang terdiri dari 3 indikator sasaran untuk Sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon, 1 untuk sasaran strategis meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah, dan 1 indikator lagi untuk sasaran strategis tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis BAPPELITBANGDA Kota Cirebon Tahun 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPD)	Target (RPJMD)	Realisasi	Tingkat Capaian (RPJMD)	Predikat
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon	Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi)	95,46%	97,19%	98,68%	101,53%	Sangat Baik
		Kesesuaian RKPD terhadap RPD/RPJMD (Integrasi)	97,62%	97,62%	98,00%	100,39%	Sangat Baik
		Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Capaian Evaluasi LKIP Bappelitbangda (skor)	79,50	79,50	80,95	101,83%	Sangat Baik
3	Tercapainya hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Baik

	yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder					
--	---	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian pada tabel 5 di atas, dapat terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja, semua indikatornya tingkat capaiannya diatas 90% atau lebih dan semua indikator telah mencapai predikat sangat baik. Adapun tingkat capaian terendah sebesar 100,00%. Hasil capaian yang sangat baik untuk seluruh indikator diperoleh karena kinerja yang baik oleh perangkat daerah. Di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan, seluruh perangkat daerah sudah tertib sehingga bias perbedaannya sangat kecil. Hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (RPJMD)	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon	3 indikator	100,64%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	1 indikator	101,83%	Sangat Baik
3	Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	1 indikator	100%	Sangat Baik

Hasil pengukuran kinerja sasaran tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat capaian dari 3 (tiga) sasaran strategis, ketiga sasaran strategis menunjukkan predikat sangat baik. Nilai ini diperoleh dengan menghitung rata-rata tingkat capaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis.

3.3. Capaian Kinerja atas IKU BAPPELITBANGDA

Tabel 7
Capaian Kinerja Atas IKU BAPPELITBANGDA Tahun 2025

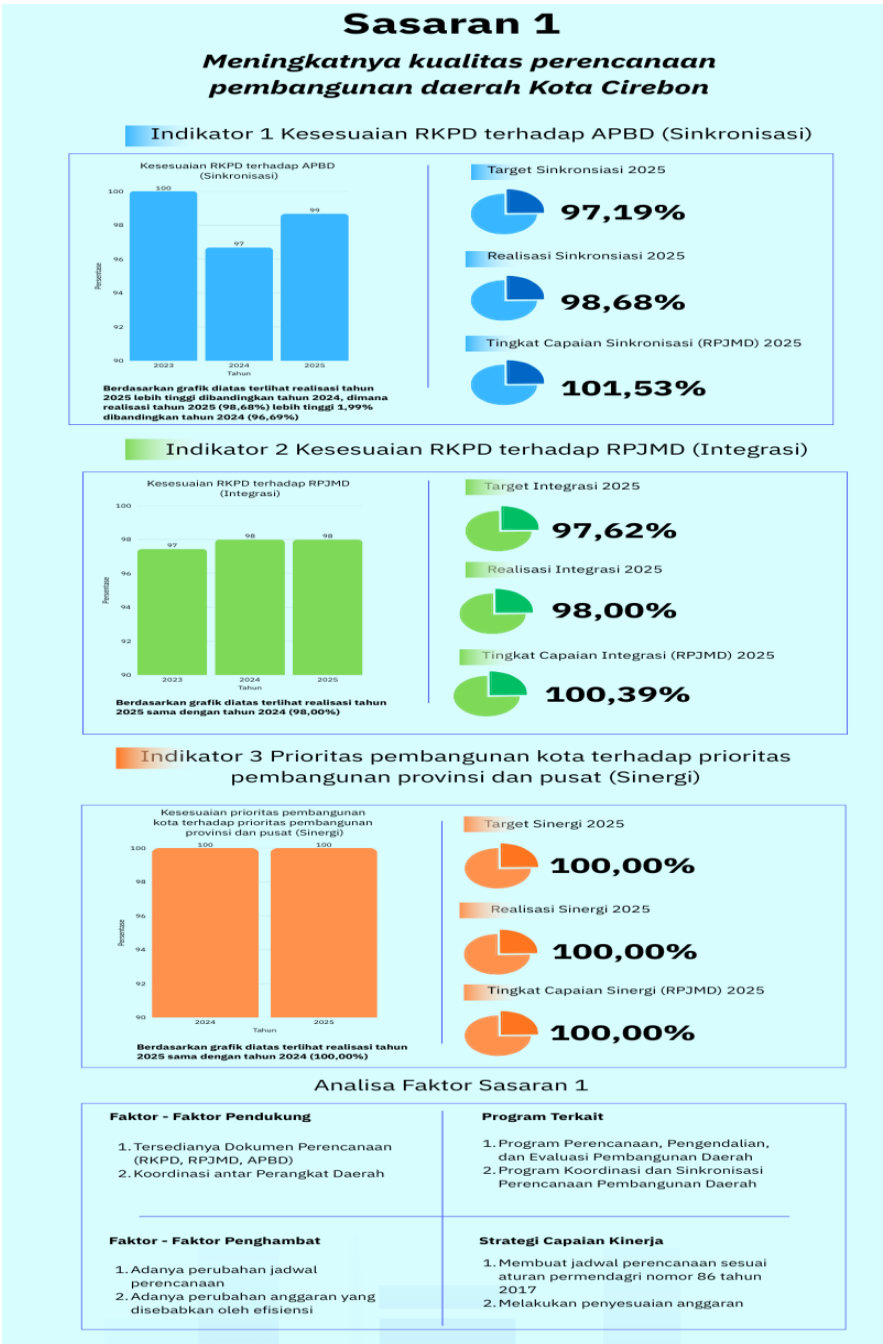
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (RPJMD)	PREDIKAT
Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi)	97,19%	98,68%	101,53%	Sangat Baik
Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD (Integrasi)	97,62%	98,00%	100,39%	Sangat Baik
Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi)	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat Baik
Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda (skor)	79,50	80,95	101,83%	Sangat Baik
Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	100%	100%	100,00%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian IKU BAPPELITBANGDA dari 5 indikator yang ditetapkan telah menunjukkan tingkat capaian yang memuaskan, dengan 5 indikator telah mencapai angka 100%. Pencapaian tertinggi ada pada indikator “Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda”, dengan target skor 79,50 ternyata realisasi pelaksanaan memiliki skor 80,95 sehingga tingkat capaian mencapai 101,83%. Sedangkan capaian terendah sebesar 100,00% ada pada indikator “Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi)” serta “Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder”.

3.4. Evaluasi dan Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tiap Tahun

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja yang berkaitan dengan tujuan pertama “Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan” adalah sebagai berikut:

3.4.1. Evaluasi Kinerja Sasaran Pertama



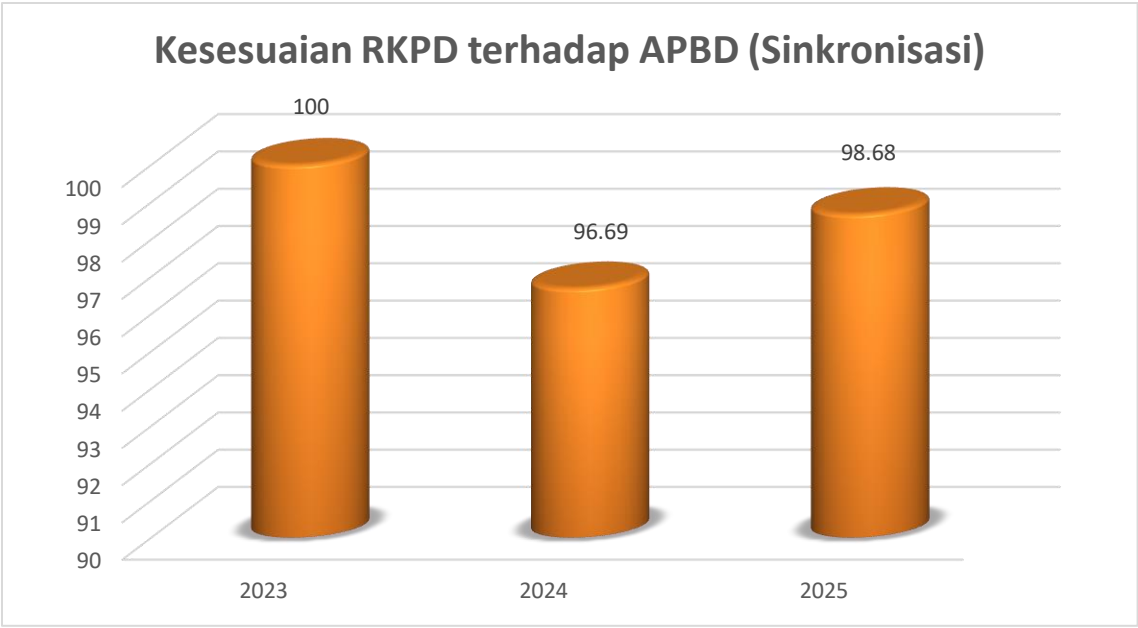
Tabel 8
Capaian Indikator Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2023	REALISASI 2024		REALISASI 2025	TARGET 2025	TERCAPAI/ TIDAK	REALISASI S/D 2025	TARGET AKHIR RENSTRA (2029)
Kesesuaian terhadap (Sinkronisasi)	RKPD APBD	100,00%	96,69%		98,68%	97,19%	TERCAPAI	98,68%	99,42%
Kesesuaian terhadap (Integrasi)	RKPD RPJMD	97,44%*	98,00%		98,00%	97,62%	TERCAPAI	98,00%	99,62%
Kesesuaian pembangunan terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi)	prioritas kota terhadap prioritas provinsi	-	100,00%		100,00%	100,00%	TERCAPAI	100,00%	100,00%

Capaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon dengan tiga indikator kinerja dari tahun 2023 sampai tahun 2025 terlihat bahwa semua indikator sudah mencapai target. Untuk indikator pertama, kesesuaian RKPD terhadap APBD ada data pembanding realisasi dari tahun 2023 dan 2024, lalu untuk indikator kedua, yaitu kesesuaian RKPD terhadap RPD untuk tahun 2024 dan data pembanding yang digunakan untuk tahun 2023 adalah kesesuaian RKPD terhadap RPJMD. Pada indikator ketiga, Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat tidak ada data pembanding pada tahun 2023 dan untuk 2024 sudah ada data pembanding.

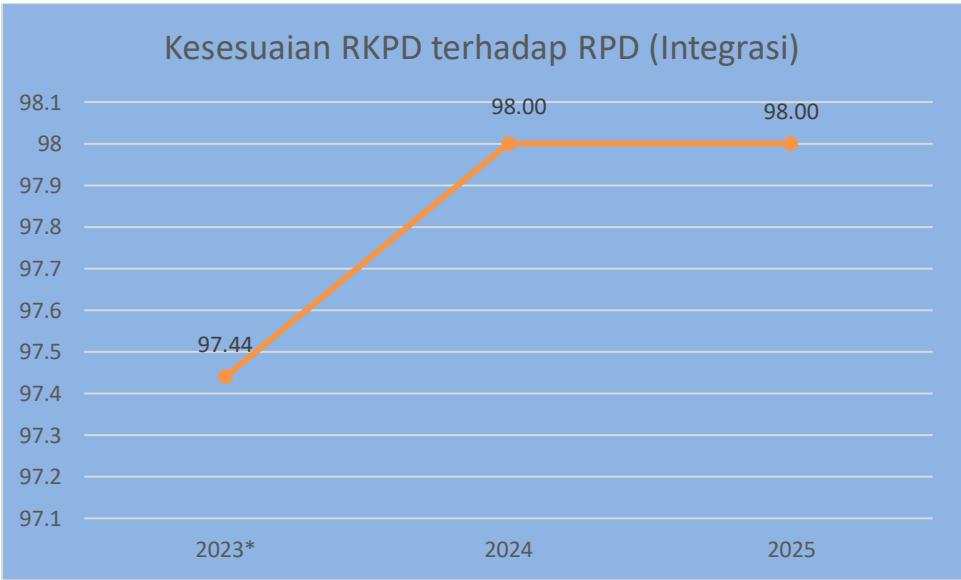
3.4.1.1. Indikator 1: Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi)

Indikator kinerja terkait dengan Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi) pada tahun 2023 dan tahun 2024 menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2023 tercapai 100% sedangkan pada tahun 2024 hanya tercapai 96,69%. Namun pada tahun 2025 realisasi indikator tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,99% menjadi 98,68%. Berikut perkembangan capaian indikator Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi):



3.4.1.2. Indikator 2: Kesesuaian RKPD terhadap RPD/RPJMD (Integrasi)

Indikator kinerja kesesuaian dokumen RKPD terhadap RPD/RPJMD merupakan indikator baru. Hal ini dikarenakan tahun 2024 dokumen perencanaan yang dipakai untuk tingkat kota adalah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan sementara pengganti RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah yang baru. Untuk membandingkan kesesuaian RKPD terhadap RPD (2024 dan 2025) maupun dengan RPJMD (2023 dan 2025), berikut perkembangan capaian indikator kinerja tingkat kesesuaian dokumen RKPD terhadap RPD maupun RPJMD:



Pada grafik di atas terlihat pada tahun 2023 (tanda *) merupakan hasil dari kesesuaian RKPD terhadap RPJMD. Apabila dibandingkan data tahun 2023 (97,44%)

dengan 2024 (98,00%) terdapat kenaikan capaian sebesar 0,56 persen. Lalu untuk tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar 98,00%

3.4.1.3. Indikator 3: Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi)

Pada indikator ketiga, yaitu Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi), indikator yang dipakai adalah indikator baru dari pusat sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian sebelumnya. Untuk indikator ketiga ini dari target yang ditentukan sebesar 100%, diperoleh realisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat adanya sinergi antara prioritas pembangunan kota dengan pembangunan provinsi maupun pusat. Berikut tabel kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi maupun pusat:

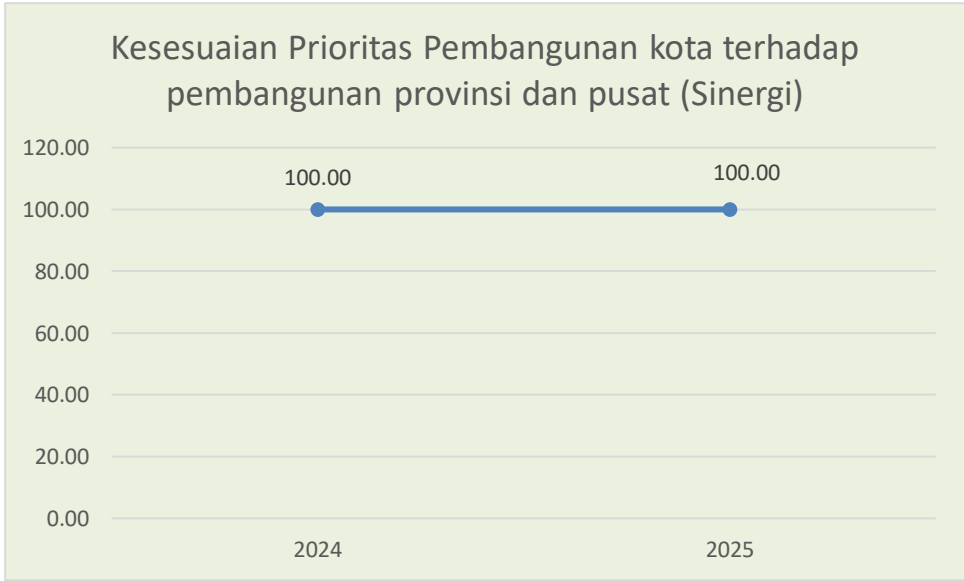
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan Kemiskinan; dan Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan ATM; dan Peningkatan Profesionalisme ASN
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah; dan Peningkatan Profesionalisme ASN
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Profesionalisme ASN; dan Penguatan Stabilitas Politik di Daerah

Prioritas pembangunan kota Cirebon terhadap prioritas pembangunan nasional

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon
1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Penanggulangan Kemiskinan; dan Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan
2	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah
3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan ATM
4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Peningkatan Profesionalisme ASN; dan Penguatan Stabilitas Politik di Daerah

Prioritas pembangunan Kota Cirebon terhadap prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat.

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja pada Indikator ketiga baru bisa dilakukan untuk tahun 2024 dan 2025 dengan grafik sebagai berikut:



Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa capaian prioritas pembangunan Kota Cirebon terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat memiliki persentase sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Kota Cirebon selaras dengan pembangunan baik di provinsi maupun di pusat.

3.4.2. Evaluasi Kinerja Sasaran Kedua



Sasaran 2: “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah terdiri dari hanya 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda. Realisasi pencapaian target pada tahun 2023 mencapai 76,85 dan pada tahun 2024 capaian target kinerja ini terjadi kenaikan sebesar 2,45 sehingga skornya yaitu 79,30. Pada tahun 2025 nilai LKIP Bappelitbangda mengalami kenaikan sebesar 1,65 menjadi 80,95 dari target 79,50 sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 103,26% dengan predikat sangat baik. Berdasarkan hasil capaian tingkat kepuasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja dan koordinasi pada BAPPELITBANGDA

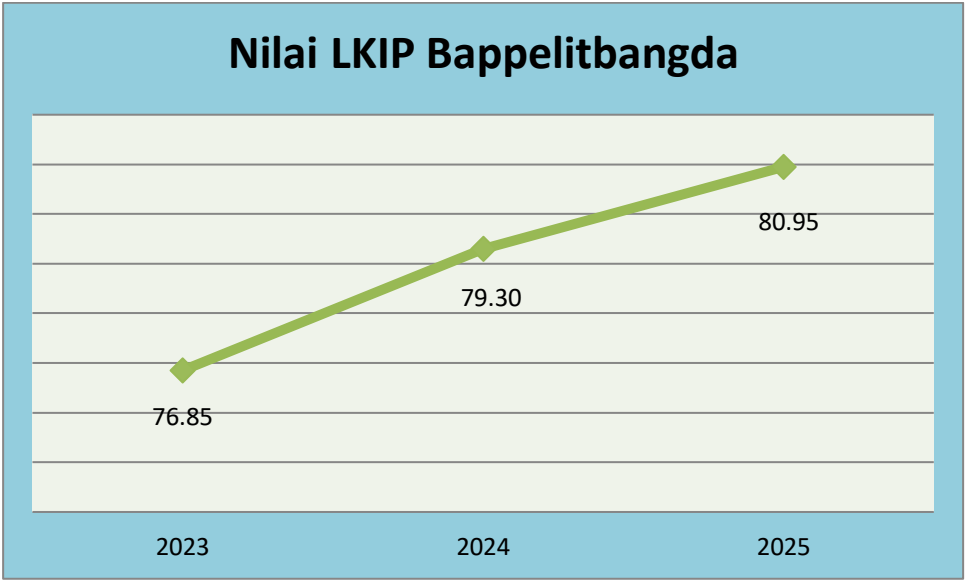
sangat baik. Berikut perkembangan capaian indikator sasaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 9
Capaian Indikator Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET 2025	TERCAPAI/ TIDAK	REALISASI S/D 2025	TARGET AKHIR RENSTRA
Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda	76,85	79,30	80,95	79,50	TERCAPAI	80,95	80,00

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja dari tahun 2023 sampai tahun 2025

memperlihatkan capaian realisasi yang mengalami peningkatan. Berikut perkembangan capaian indikator Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda selama 3 tahun terakhir:



3.4.3. Evaluasi Kinerja Sasaran Ketiga

SASARAN 3

TERCAPAINYA HASIL KELITBANGAN YANG DIDISEMINASIKAN KEPADA PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU STAKEHOLDER

01

PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG DIDISEMINASIKAN KEPADA PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU STAKEHOLDER

Pada tahun 2025 realisasinya mencapai 100%

02

CAPAIAN TAHUN 2025

Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian Kinerja : 100%

03

DOKUMEN TAHUN 2025

1. Strategi Pengembangan Wisata Religi dan Budaya Berbasis Teknologi dan Inovasi
2. Analisis Situasi dan Evaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Cirebon Tahun 2019-2025
3. Analisis Komprehensi Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Cirebon : Trend, Kekambuhan, dan Intervensi Terpadu
4. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Cirebon Tahun 2025 - 2029
5. Analisis Situasi Penggerakaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Cirebon
6. Pemetaan Klaster Industri Kota Cirebon

04

FAKTOR PENGHAMBAT

1. Adanya efisensi yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana
2. Berubahnya jadwal kegiatan akibat efisensi

05

FAKTOR PENDUKUNG

1. Adanya tambahan tenaga dari PPPK
2. Adanya tim kelitbangan yang melibatkan mitra dari perguruan tinggi

Sasaran 3 : “Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder”

Sasaran tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder dengan 1 indikator yaitu persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder. Indikator kinerja dilihat dari berapa banyak dokumen yang dihasilkan dan diseminasikan. Pada tahun 2024 ini ada target 7 dokumen dan realisasinya tercapai 7 dokumen dan diperoleh capaian sebesar 100,00%. Pada tahun 2023 dari target 7 dokumen tercapai 8 dokumen sehingga diperoleh capaian realisasinya sebesar 114,29%. Di tahun 2025 realisasi dokumen yang dihasilkan sesuai dengan target. Dari target 6 dokumen, tahun 2025 tercapai 6 dokumen kajian yang dihasilkan sehingga diperoleh capaian realisasinya

sebesar 100,00%. Perkembangan pencapaian indikator sasaran tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 10
Capaian Indikator Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024		REALISASI 2025	TARGET 2025	TERCAPAI/ TIDAK	REALISASI S/D 2025	TARGET AKHIR RENSTRA
Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	114,29%	100,00%		100,00%	100,00%	TERCAPAI	100,00%	100,00%

Capaian sasaran tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder diukur dengan melihat persentase hasil kelitbangan yang diperoleh dari realisasi dokumen yang dihasilkan dibandingkan dengan target dokumen yang dihasilkan. Capaian Pada tahun 2023 dari target 7 dokumen tercapai 8 dokumen sehingga diperoleh capaian realisasinya sebesar 114,29%. Di tahun 2024 realisasi dokumen yang dihasilkan sesuai target. Dari target 7 dokumen, tercapai 7 dokumen kajian yang dihasilkan sehingga diperoleh capaian realisasinya sebesar 100,00%. Pada 2025 ini dari target dokumen yang dihasilkan sebanyak 6 dokumen dan berhasil direalisasikan sebanyak 6 dokumen yang menandakan bahwa capaian realiasasi mencapai 100%. Berikut capaian indikator tersebut dalam 3 tahun terakhir:



Capaian indikator Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder pada tahun 2025, yang dihitung pada realisasi dokumen.

Dari 6 dokumen pada target pada tahun 2025, sebanyak 6 dokumen telah direalisasikan yaitu:

1. Strategi Pengembangan Wisata Religi dan Budaya Berbasis Teknologi dan Inovasi;
2. Analisis Situasi dan Evaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Cirebon Tahun 2019 - 2025;
3. Analisis Komprehensi Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Cirebon : Trend, Kekambuhan, dan Intervensi Terpadu;
4. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Cirebon Tahun 2025 - 2029;
5. Analisis Situasi Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kota Cirebon; dan
6. Pemetaan Klaster Industri Kota Cirebon.

Untuk realisasi kinerja dengan standar nasional, Bappelitbangda tidak memiliki target kinerja yang berpatokan dengan standar nasional.

3.5. Realisasi Anggaran BAPPELITBANGDA

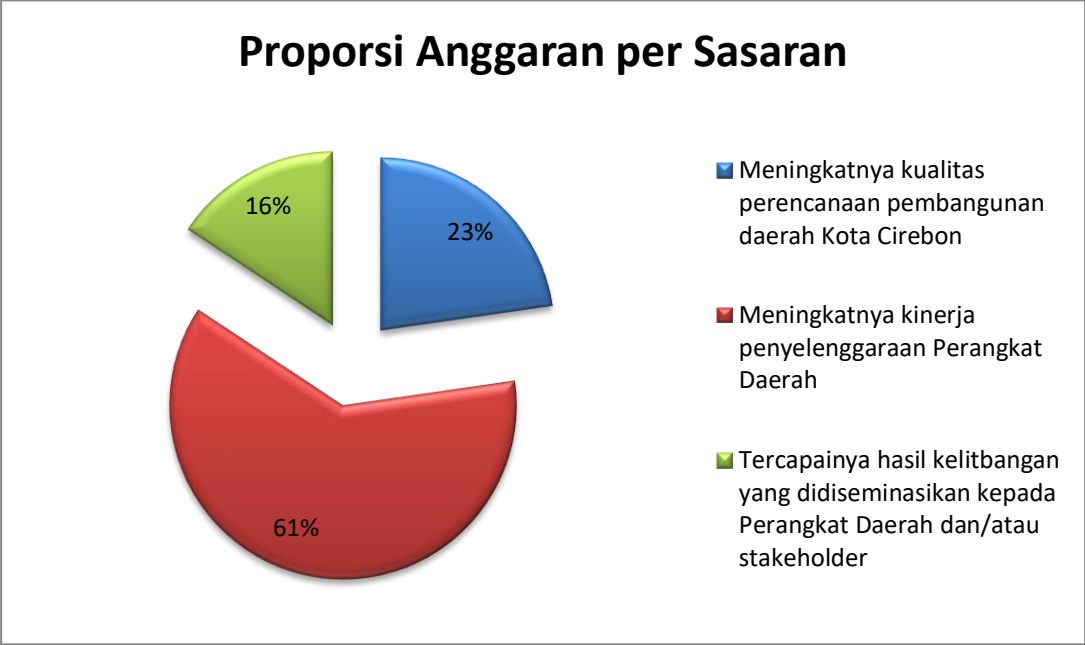
APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2024 dan Penjabarannya melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 87 Tahun 2023 yang kemudian ditetapkan penjabarannya yang baru melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2024, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Adapun APBD Kota Cirebon Tahun 2025 untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dianggarkan sebagai berikut:

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG		9.312.416.131	8.504.409.400
BELANJA LANGSUNG		3.984.634.659	3.438.505.325
Urusan Rutin Yang ada Di Setiap SKPD :			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.431.116.061	2.062.654.189
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	46.840.899	45.566.915
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.503.490	4.352.000

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85.382.125	68.834.900
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.112.500	4.012.500
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	604.717.835	525.597.759
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.271.025	307.192.999
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.529.737	693.792.045
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	607.758.850	413.305.071
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan:			
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	316.093.315	207.131.272
	1. Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	250.438.815	167.059315
	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	46.135.050	30.003.557
	3. Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	16.052.025	15.333.032
	4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4.651.050	0
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	614.309.682	565.617.344
	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	201.702.200	173.197.307
	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	192.481.302	186.583.397
	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	220.126.180	205.836.640
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	623.115.601	603.102.520
	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan	186.039.009	155.296.896
	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	78.795.075	78.795.075
	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	149.999.600	149.749.600
	4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	208.281.917	208.260.949

Jika dibandingkan berdasarkan proporsi anggaran untuk setiap pencapaian satu sasaran maka dapat dilihat pada grafik berikut ini bahwa anggaran untuk mencapai sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah diperlukan sebanyak 61% dari total anggaran yang ada, sedangkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon diperlukan sebesar 23% dari total anggaran, dan 16% lagi digunakan untuk mencapai sasaran Tercapainya hasil

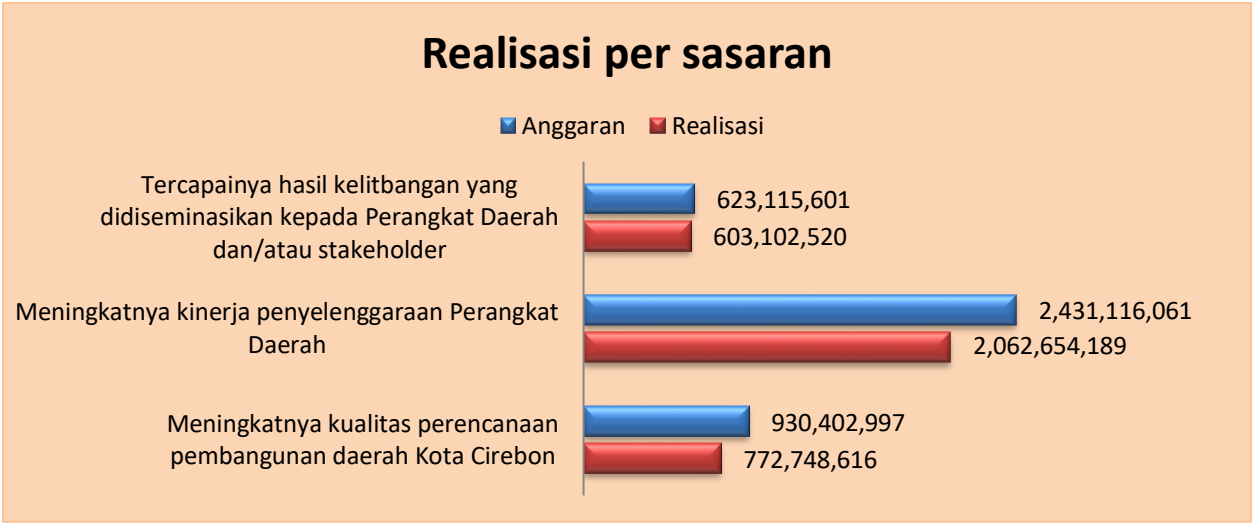
kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran untuk kinerja dan koordinasi pada BAPPELITBANGDA dibutuhkan anggaran yang paling besar. Berikut grafik proporsi anggaran setiap sasaran kinerja:



Berdasarkan jumlah anggaran yang sebesar Rp. 13.297.050.790,00 anggaran yang terkait langsung dengan kegiatan adalah sebesar Rp. 3.984.634.659,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.438.505.325,00 (86,29%). Dari total anggaran tersebut, capaian realisasi anggaran per sasaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon	930.402.997	772.748.616	83,06%
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	2.431.116.061	2.062.654.189	84,84%
3	Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	623.115.601	603.102.520	96,79%

Dari tabel di atas diketahui realisasi keuangan tertinggi pada sasaran ketiga yaitu Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder sebesar 96,79%, berikutnya pada sasaran kedua yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah sebesar 84,84%. Untuk yang terendah realisasinya ada pada sasaran pertama yaitu Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon sebesar 83,06%. Berikut diagram realisasi anggaran per sasaran:



Anggaran belanja langsung digunakan untuk melaksanakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BAPPELITBANGDA. Anggaran untuk mendukung tujuan dan sasaran pertama “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon” sebesar Rp. 930.402.997,00 dengan realisasi sebesar Rp. 772.748.616,00 atau sebesar 83,06% yang tersebar pada 2 program di bawah ini:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	316.093.315,00	207.131.272,00	65,53
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	614.309.682,00	565.617.344,00	92,07
	Jumlah	930.402.997,00	772.748.616,00	83,06

Berdasarkan tabel di atas terlihat kedua program tersebut dapat dilaksanakan dengan persentase yang berbeda. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah capaian kinerjanya diatas 90% yaitu 92,07%. Lalu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah capaian kinerjanya diatas 60% dengan nilai capaian kinerja sebesar 65,53%. Walaupun mengalami efisiensi anggaran, kedua program ini terus berusaha untuk mencapai target kinerja.

Program yang mendukung pencapaian tujuan dari sasaran kedua “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah” dianggarkan sebesar Rp. 2.431.116.061,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.062.654.189,00 atau 84,84% yang tersebar pada 1 program di bawah ini:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.431.116.061,00	2.062.654.189,00	84,84
	Jumlah	2.431.116.061,00	2.062.654.189,00	84,84

Anggaran yang mendukung pencapaian tujuan dari sasaran kedua “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah” sebesar Rp. 2.881.113.946,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.296.482.716,00 atau 79,71% menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih berada diatas 70%.

Program yang mendukung pencapaian tujuan dari sasaran ketiga “Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder” dianggarkan sebesar Rp. 734.721.716,00 dengan realisasi sebesar Rp. 692.327.305,00 atau 94,23% yang tersebar pada 1 program di bawah ini:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	734.721.716,00	692.327.305,00	94,23
	Jumlah	734.721.716,00	692.327.305,00	94,23

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, capaian kinerjanya diatas 90%, yaitu 94,23% dengan menghasilkan 7 dokumen kajian dengan target kinerja 100%.

3.6. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan menggambarkan realisasi anggaran terhadap data capaian kinerja. Dalam hal ini akan terlihat efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu menyandingkan data pecapaian kinerja pada setiap sasaran dalam RPJMD dengan realisasi anggaran yang menopang pencapaian sasaran tersebut dimana efesien jika capaian kinerja sama atau lebih dan realisasi anggaran dibawahnya, tidak efesien jika realisasi capaian kinerja di bawah realisasi anggaran, sebagai berikut:

Peningkatan Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan

	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025 (RPD)	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Realisasi 2024
1	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	97,34	98,64	101,33	97,94

Tujuan/Sasaran “Meningkatkanya dukungan penyelenggaraan pemerintahan” dengan indikator: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi bagian tolak ukur dalam mewujudkan kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah. Pada tahun 2025 Pemerintah kota Cirebon telah menargetkan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan perhitungan BAPPELITBANGDA pada tahun 2025 realisasi untuk indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dengan rincian (terlampir). Berdasarkan data yang diperoleh, nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 memiliki nilai 98,40% dimana terdapat kenaikan sebesar 0,70 dari tahun sebelumnya (2024) yang memiliki nilai 97,94%. Hasil realisasi kinerja berdasarkan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh beberapa program yaitu:

- 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil pelaksanaan kedua program tersebut tidak lepas dari peran serta semua perangkat daerah di Kota Cirebon.

Total realisasi anggaran pada kedua program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah sebesar Rp 772.748.616,- atau sekitar 83,06% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 930.402.997,-.

Realisasi Anggaran dalam rangka Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator	Capaian kinerja	Realisasi anggaran	Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	101,33%	83,06%	18,27%

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pada indikator tersebut. Untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut beberapa upaya telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diantaranya: meningkatkan koordinasi dengan semua Perangkat Daerah di Kota Cirebon, meningkatkan intensitas rapat dan desk dengan Perangkat Daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sistem perencanaan daerah melalui SIPD dari Kemendagri, meningkatkan sinergitas SDM perencana agar tumbuh kekompakan dan kerja sama yang lebih baik lagi. Namun dengan kondisi terjadinya rasionalisasi yang disebabkan kondisi keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu dengan dimulainya perencanaan dan penganggaran menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tentunya masih banyak hal yang harus dipelajari dan dimengerti oleh aparatur sipil negara (ASN) di masing-masing Perangkat Daerah. Namun demikian segala upaya tetap dilakukan guna mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) karena hasil capaian kinerja berada di atas realisasi anggaran, dengan nilai sebesar 18,27%.

Peningkatan Dukungan Pembangunan Kota Cirebon Berbasis Kelitbangan

	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025 (RPD)	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
2	Meningkatnya dukungan pembangunan Kota Cirebon berbasis kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	71%	100%	142,86%

Tujuan/Sasaran “Meningkatnya dukungan pembangunan Kota Cirebon berbasis kelitbangan” dengan indikator: Persentase rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau stakeholder menjadi salah satu tolak ukur dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon. Pada tahun 2025 Pemerintah kota Cirebon telah menargetkan indikator Persentase rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau stakeholder sebesar 71%. Berdasarkan perhitungan BAPPELITBANGDA pada tahun 2025 realisasi untuk indikator Persentase rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau stakeholder adalah 100%, dimana dari 6 kajian yang telah dihasilkan pada tahun 2025, 6 kajian telah diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau stakeholder. Nilai realisasi ini sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 yang sebesar 71% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 142,86%. Pencapaian indikator Persentase rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau stakeholder didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terdiri dari empat kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Total realisasi anggaran pada program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp 692.327.305,- atau sekitar 94,23% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 734.721.716,-

Realisasi Anggaran dalam rangka Meningkatkan Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah

Indikator	Capaian kinerja	Realisasi anggaran	Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)
Persentase rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	142,86%	94,23%	48,63%

Sedangkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator “Persentase rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau stakeholder” menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) karena hasil capaian kinerja berada di atas realisasi anggaran, dengan nilai efisiensi 48,63 persen.

3.7. Prestasi dan Penghargaan

Berdasarkan Surat dari Inspektorat Daerah dengan nomor 700.1.2.1/LHE.098-PEP tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 menyatakan bahwa dari hasil evaluasi AKIP pada Bappelitbangda Kota Cirebon, diperoleh nilai AKIP Bappelitbangda Kota Cirebon tahun 2025 sebesar 80,95 dengan rincian penilaian pada tabel berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	80,95
Predikat			A

Dengan nilai AKIP Bappelitbangda sebesar 80,95, Bappelitbangda Kota Cirebon memperoleh piagam penghargaan atas prestasinya sebagai peringkat ke-4 dari 32 OPD untuk nilai AKIP tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan dari Pemerintah Kota Cirebon



3.8. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penghambat serta Evaluasi

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mencapai target yang ditentukan, baik target sasaran kinerja, program, kegiatan, maupun sub kegiatan. Berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2025:

1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang belum optimal
2. Jadwal perencanaan yang cukup padat dan banyak perubahan jadwal
3. Adanya efisiensi anggaran yang memengaruhi kegiatan

Dari permasalahan tersebut, telah dilakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan proses perencanaan agar sesuai dengan jadwal perencanaan yang berdasarkan pada Permendagri No.86 Tahun 2017, diantaranya:

1. Memberikan surat antaran atau peringatan untuk ketepatan waktu dan koordinasi
2. Melakukan sistem "jemput bola" untuk mempercepat proses koordinasi
3. Jika diperlukan, dilakukan penjadwalan ulang dalam menyelesaikan dokumen perencanaan.

Untuk menjamin adanya perbaikan kinerja pada tahun berikutnya maka terdapat beberapa langkah maupun tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara Bappelitbangda terutama di bidang Perencanaan dengan mitra Perencanaan (Perangkat Daerah)
2. Pengumpulan data mengenai survei kepuasan masyarakat di Bappelitbangda diberi batas waktu agar pengolahan data menjadi lebih mudah
3. Koordinasi antar bidang di Bappelitbangda untuk memudahkan dalam permintaan data
4. Bidang Litbang dan Perangkat Daerah melakukan koordinasi terkait kajian apa saja yang dibutuhkan, sehingga bidang litbang bisa membuat kajian yang tepat.
5. Perlunya kolaborasi antar tiap perangkat daerah di Kota Cirebon dalam rangka menaikkan indeks skor inovasi daerah serta menumbuhkan semangat inovatif.

Berikut Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Upaya Pemecahan Masalah
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon Tahun 2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
Adanya aturan yang melandasi (misal Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	Belum optimalnya koordinasi antara bidang perencanaan dengan mitra perencanaan	Perlu ditingkatkan komunikasi antar bidang perencanaan dengan mitra perencanaan
Adanya bidang perencanaan yang memiliki mitra perencanaan	Adanya indikator sasaran yang baru sehingga tidak memiliki data awal	Data terkait program dan kegiatan tiap perangkat daerah langsung disampaikan
Ketersediaan Dokumen pendukung (RPD, RKPD, maupun dokumen lainnya)	Adanya beberapa perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan perencanaan	Melakukan penjadwalan ulang terkait kegiatan perencanaan yang berubah

Berikut Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Upaya Pemecahan Masalah
Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Tahun 2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
Data Pendukung LKIP yang diperoleh dari bidang-bidang terkait (perencanaan dan kelitbangan)	Adanya format baru dalam pembuatan LKIP	Koordinasi antar bidang untuk memperoleh data dukung dalam dokumen LKIP

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
Adanya hasil evaluasi LKIP yang menjadikan acuan dalam pembuatan LKIP selanjutnya	Deadline waktu pengumpulan LKIP yang terlalu mepet	Melakukan penyesuaian format baru dalam pembuatan laporan LKIP
	Adanya penambahan format dari bagian organisasi untuk LKIP	Menyesuaikan format yang diminta organisasi dalam pembuatan LKIP

Berikut Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Upaya Pemecahan Masalah

Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Tahun 2024

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
Ketersediaan tim kelitbangan yang terdiri dari akademisi dan SDM internal bidang	Efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa kajian tidak dapat dilaksanakan	Dilakukan skala prioritas kajian yang akan dilaksanakan dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah
Sudah adanya pejabat fungsional peneliti	Masih terbatasnya jumlah fungsional peneliti yang sesuai kepakaran kajian	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan oleh Tim Kelitbangan dibantu oleh Fungsional Peneliti, Analis Kebijakan, dan Analis Litbang
Anggaran yang tersedia yang mencukupi untuk kegiatan kelitbangan	Hasil rekomendasi dari kajian belum optimal atau dijadikan bahan kegiatan usulan perencanaan	Akan dilaksanakan FGD/Rapat koordinasi yang melibatkan Perangkat Daerah, terkait hasil kegiatan pada tahun berjalan.
Adanya pegawai baru di bidang litbang dari PPPK	Pegawai baru masih perlu beradaptasi dengan alur kerja Litbang	Membantu pegawai baru untuk beradaptasi dengan baik dengan kegiatan kelitbangan

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 telah disusun dalam rangka pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, hasil capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon, yang terdiri dari lima indikator kinerja yaitu:

1. Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi) dengan hasil capaian kinerja sebesar 98,68%;
2. Kesesuaian RKPD terhadap RPD (Integrasi) dengan hasil capaian 98,00%;
3. Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi) dengan nilai capaian 100,00%;
4. Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda dengan hasil capaian kinerja berupa skor sebesar 80,95;
5. Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder dengan hasil capaian kinerja 100,00%.

Berdasarkan dari lima indikator tersebut, diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja pada indikator sasaran “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon” sebesar 101,25%, tingkat capaian kinerja indikator sasaran “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah” sebesar 101,83%, dan tingkat capaian kinerja indikator pada sasaran “Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder” sebesar 100,00%. Capaian indikator sasaran ini mendukung sasaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 - 2026.

Sedangkan dari sisi anggaran, untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon” dengan tiga indikator dianggarkan sebesar Rp. 930.402.997,00 dengan realisasi sebesar Rp. 772.748.616,00 atau sekitar 83,06%, selanjutnya untuk sasaran “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah” dengan satu indikator dianggarkan sebesar Rp. 2.431.116.061,00 terealisasi

sebesar Rp. 2.062.654.189,00 atau sekitar 84,84%, lalu untuk sasaran "Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder" dengan satu indikator dianggarkan sebesar Rp. 623.115.601,00 terealisasi Rp. 603.102.520,00 atau sekitar 96,79%. Adapun total anggaran belanja langsung yang dapat direalisasikan BAPPELITBANGDA Kota Cirebon tahun 2025 sebesar 86,29% dimana terdapat realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.438.505.325,00 dari anggaran sebesar Rp. 3.984.634.659,00.

Cirebon, 5 Februari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON



Drs. AGUS HERDHYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680823 198803 1 001

LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN 2025**

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Tahun Anggaran : 2025

	Tujuan (RPD)	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	97,34%	98,64%	97,94%
2	Meningkatnya dukungan pembangunan Kota Cirebon berbasis kelitbangan	Persentase Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	71%	100%	71,43%

	Sasaran Strategis (RPD)	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon	Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi)	95,46%	98,68%	96,69%
		Kesesuaian RKPD terhadap RPD (Integrasi)	97,62%	98,00%	98,00%
		Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi)	100,00%	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda	79,50 poin	80,95 poin	79,30 poin
3	Tercapainya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	100,00%	100,00%	100,00%

KERTAS KERJA PENGUKURAN KINERJA

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator	Skor	Nilai Bobot	Skor Akhir
1	Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi)	98,68%	35%	34,54
2	Kesesuaian RKPD terhadap RPD (Integrasi)	98,00%	45%	44,10
3	Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi)	100,00%	20%	20,00
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		98,64		

2. Kesesuaian RKPD terhadap APBD (Sinkronisasi)

APBD 25	RKPD 2025	APBD 2025 yang sesuai RKPD 2025	Perangkat Daerah
Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

APBD 25	RKPD 2025	APBD 2025 yang sesuai RKPD 2025	Perangkat Daerah
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

APBD 25	RKPD 2025	APBD 2025 yang sesuai RKPD 2025	Perangkat Daerah
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

APBD 25	RKPD 2025	APBD 2025 yang sesuai RKPD 2025	Perangkat Daerah
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup

APBD 25	RKPD 2025	APBD 2025 yang sesuai RKPD 2025	Perangkat Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Sekretariat Daerah
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Sekretariat Daerah
Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

APBD 25	RKPD 2025	APBD 2025 yang sesuai RKPD 2025	Perangkat Daerah
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan dan Informasi Komunikasi Publik		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

APBD 25	RKPD 2025	APBD 2025 yang sesuai RKPD 2025	Perangkat Daerah
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

APBD 25	RKPD 2025	APBD 2025 yang sesuai RKPD 2025	Perangkat Daerah
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perizinan Penggunaan Arsip		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

APBD 25	RKPD 2025	APBD 2025 yang sesuai RKPD 2025	Perangkat Daerah
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Sekretariat Daerah
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Sekretariat Daerah

APBD 25	RKPD 2025	APBD 2025 yang sesuai RKPD 2025	Perangkat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kesambi

APBD 25	RKPD 2025	APBD 2025 yang sesuai RKPD 2025	Perangkat Daerah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Kesambi
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kesambi
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kesambi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Pekalipan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Pekalipan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pekalipan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Pekalipan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Harjamukti
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Harjamukti
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Harjamukti
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Harjamukti
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kejaksan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Kejaksan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kejaksan

APBD 25	RKPD 2025	APBD 2025 yang sesuai RKPD 2025	Perangkat Daerah
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kejaksan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Lemahwungkuk
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Lemahwungkuk
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lemahwungkuk
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lemahwungkuk
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
149	151	149	98.68

3. Kesesuaian RKPD terhadap RPD (Integrasi)

RPD	RKPD 2025	RKPD 2025 yang sesuai RPD	Perangkat Daerah
Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengembangan Permukiman			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

RPD	RKPD 2025	RKPD 2025 yang sesuai RPD	Perangkat Daerah
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial

RPD	RKPD 2025	RKPD 2025 yang sesuai RPD	Perangkat Daerah
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

RPD	RKPD 2025	RKPD 2025 yang sesuai RPD	Perangkat Daerah
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup

RPD	RKPD 2025	RKPD 2025 yang sesuai RPD	Perangkat Daerah
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Sekretariat Daerah
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Sekretariat Daerah
Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

RPD	RKPD 2025	RKPD 2025 yang sesuai RPD	Perangkat Daerah
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

RPD	RKPD 2025	RKPD 2025 yang sesuai RPD	Perangkat Daerah
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

RPD	RKPD 2025	RKPD 2025 yang sesuai RPD	Perangkat Daerah
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

RPD	RKPD 2025	RKPD 2025 yang sesuai RPD	Perangkat Daerah
Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

RPD	RKPD 2025	RKPD 2025 yang sesuai RPD	Perangkat Daerah
Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kesambi
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Kesambi
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kesambi
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kesambi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Pekalipan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Pekalipan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pekalipan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Pekalipan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Harjamukti

RPD	RKPD 2025	RKPD 2025 yang sesuai RPD	Perangkat Daerah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Harjamukti
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Harjamukti
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Harjamukti
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kejaksan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Kejaksan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kejaksan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kejaksan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Lemahwungkuk
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Lemahwungkuk
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lemahwungkuk
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lemahwungkuk
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RPD	RKPD 2025	RKPD 2025 yang sesuai RPD	Perangkat Daerah
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
150	149	147	98.00

4. Kesesuaian prioritas pembangunan kota terhadap prioritas pembangunan provinsi dan pusat (Sinergi)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan Kemiskinan; dan Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan ATM; dan Peningkatan Profesionalisme ASN
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah; dan Peningkatan Profesionalisme ASN
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Profesionalisme ASN; dan Penguatan Stabilitas Politik di Daerah

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon
1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	Penanggulangan Kemiskinan; dan Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan
2	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah
3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan ATM
4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Peningkatan Profesionalisme ASN; dan Penguatan Stabilitas Politik di Daerah

5. Nilai Capaian Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	80,95
Predikat			A

6. Persentase Hasil Kelitbangan yang Didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan/atau stakeholder

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
100,00%	100,00%	100,00%

7. Persentase Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Kelitbangan yang Diserahkan untuk Dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Stakeholder

Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
71,00%	100,00%	140,85

8. Dokumen Kajian Kelitbangan Tahun 2025

- 1) Strategi Pengembangan Wisata Religi dan Budaya Berbasis Teknologi dan Inovasi;
- 2) Analisis Situasi dan Evaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Cirebon Tahun 2019 - 2025;
- 3) Analisis Komprehensi Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Cirebon : Trend, Kekambuhan, dan Intervensi Terpadu;
- 4) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Cirebon Tahun 2025 - 2029;
- 5) Analisis Situasi Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kota Cirebon; dan
- 6) Pemetaan Klaster Industri Kota Cirebon.